



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada Dinas BKAD

Christine Monica Saren¹, Rahayu Mokoagow²

¹⁻²Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung, Indonesia

Abstract: *This study aims to analyze the factors that affect the quality of government financial report information at the Regional Finance and Assets Agency (BKAD). The factors studied include human resource competence, internal control, information technology utilization, and accounting understanding. Data was collected through a questionnaire distributed to BKAD employees and analyzed using the multiple linear regression method. The results of the study show that all the factors studied have a significant influence on the quality of financial statement information. These findings emphasize the importance of improving human resource competence, effective internal control, optimal use of information technology, and a good understanding of accounting in order to produce quality financial reports.*

Keywords: *Financial report information quality, Internal control, Information technology*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pada Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Faktor-faktor yang diteliti meliputi kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pegawai BKAD dan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor yang diteliti memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal yang efektif, penggunaan teknologi informasi yang optimal, dan pemahaman akuntansi yang baik dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kata kunci: Kualitas informasi laporan keuangan, Pengendalian internal, Teknologi informasi

1. PENDAHULUAN

Badan keuangan aset dan daerah Kota Bitung (BKAD) adalah suatu instansi yang ada di Kota Bitung yang bertugas untuk membantu sekaligus melancarkan tugas walikota Bitung. BKAD membantu walikota dalam melaksanakan sebagian besar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Bitung dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah. Kebijakan-kebijakan daerah tersebut meliputi bidang administrasi keuangan daerah Kota Bitung yang mencakup penyusunan perencanaan APBD, Perubahan APBD, Invesatasi Daerah, Peminjaman Daerah, serta Perlengkapan dan Peralatan yang berupa aset-aset daerah yang dibutuhkan oleh pemerintahan daerah Kota Bitung. Berdasarkan standar kebijakan umum daerah Kota Bitung serta norma ataupun prosedur perundang-undangan yang berlaku, Kantor BKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi beberapa jabatan fungsional di Kantor tersebut seperti, Sekretaris, Sub-Bagian, Kepala Bidang yang juga tiap-tiap jabatan fungsional ini membawahi staf-staf umum di bawah nya.

Aset-aset daerah yang akan masuk ke Kantor BKAD Kota Bitung nantinya akan di daftarkan sebagai aset daerah oleh staf-staf yang bekerja di kantor tersebut. Banyaknya barang yang masuk membuat para staf harus melakukan manajemen terhadap aset daerah yang masuk secara keseluruhan. Manajemen aset merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap aset-aset barang kantor atau sejenisnya yang ada pada setiap instansi atau perusahaan guna untuk menjaga nilai, status atau ketersediaan dari aset tersebut.

BKAD Kota Bitung merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung dan sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Walikota Bitung Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung, yang menerangkan bahwa BKAD Kota Bitung adalah unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Maka BKAD sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang menerima pelimpahan wewenang dari Walikota Bitung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem akuntansi pemerintah, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab penyebab kualitas informasi keuangan tidak berjalan dengan baik.

Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah alat utama yang digunakan oleh pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan publik, untuk mengevaluasi kinerja keuangan sebuah perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan bisnis. Kualitas informasi laporan keuangan memiliki dampak langsung pada kemampuan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Informasi yang akurat, relevan, dan andal dalam laporan keuangan mendukung transparansi dan pertanggung jawaban perusahaan. Oleh karena itu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi dari laporan keuangan di manfaatkan oleh pihak internal dan eksternal yang membutuhkan, informasi tersebut digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, oleh karenanya laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pengguna sesuai keperluannya. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan internal.

Tujuan laporan keuangan yaitu dasar pelaporan informasi keuangan di pemerintahan yang akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Faktor-faktor seperti tekanan pasar, insentif manajerial, dan budaya perusahaan dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam melaporkan informasi keuangan dengan jujur. Permasalahan paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan pegawai belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian anggaran pendapatan, kelemahan struktur pengendalian intern.

Isu-isu integritas dan etika dalam pelaporan keuangan, seperti manipulasi laporan keuangan (fraud), juga menjadi perhatian utama. Mencatat suatu transaksi dan pengeluaran laporan keuangan harus sesuai dengan posisinya, sebagaimana yang diungkapkan dalam standar akuntansi bahwa laporan keuangan berkualitas, kriterianya adalah harus disajikan secara andal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat dan melakukan suatu penelitian dengan judul “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS BKAD KOTA BITUNG** “

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang ada dalam latar belakang dapat disimpulkan sebuah masalah yaitu di antaranya :

1. Apakah analisis faktor-faktor berpengaruh pada laporan keuangan pada dinas BKAD kota Bitung?
2. Bagaimana kontrol intern di kantor BKAD mempengaruhi kualitas laporan keuangan, terutama dalam mencegah kesalahan dan kecurangan?
3. Bagaimana integritas dan etika manajemen di kantor BKAD berdampak kepada kejujuran dan keandalan informasi dalam laporan keuangan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peningkatan transparansi dan Akuntabilitas dalam penggunaan dan publik dan pengelolaan aset yang dikelola oleh kantor BKAD.
2. Untuk mengetahui dan Meningkatkan efisiensi orpasional dengan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, kantor BKAD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan keuangan dan sistem keuangan mereka.
3. Untuk mengetahui pencegahan dan mendeteksi kecurangan akuntansi termasuk manipulasi laporan keuangan.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan, alokasi sumber daya, dan strategi bisnis. Meningkatkan transparansi analisis ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, yang dapat membangun kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pemegang saham. Identifikasi perbaikan proses dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi area dimana perbaikan dalam proses akuntansi dan pelaporan diperlukan.

2. Bagi Masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas Perusahaan Analisis ini dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi membantu masyarakat dalam memahami penggunaan dana perusahaan. Perlindungan masyarakat dan investor mendapat manfaat dari laporan keuangan yang berkualitas tinggi karena dapat memberikan informasi yang lebih andal untuk mengambil keputusan investasi. Dengan peningkatan transparansi dan kualitas informasi laporan keuangan, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan bagaimana mereka memengaruhi ekonomi dan lingkungan sosial.

3. Bagi Penulis

Peningkatan Praktik Profesional analisis faktor-faktor kualitas informasi laporan keuangan membantu penulis, seperti akuntan dan auditor, untuk memahami lebih baik aspek-aspek penting yang mempengaruhi laporan keuangan. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan praktik profesional mereka.

Identifikasi Risiko dan Kecurangan dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, penulis dapat mengidentifikasi resiko potensial dan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut. "agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent". Artinya, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang ataulebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Pengawasan Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal mendefinisikan Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian interen yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Pemahaman Peraturan

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Hoetomo, 2005). Pengertian Peraturan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku, atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Definisi pemahaman peraturan adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah (Kiranayanti, 2016). Peraturan yang di maksud disini adalah PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Menurut Bastian (2006), Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Para pengelola perlu memiliki pemahaman memadai tentang standar akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal. Dalam fungsi pengukuran, akuntansi melakukan proses pengumpulan, pencatatan realisasi pendapatan dan belanja serta transaksi-transaksi yang terjadi diluar pendapatan dan belanja, serta aktivitas pelaporan. Selanjutnya akan dapat digunakan sebagai pengukur kinerja ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Zuliatri (2012), Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang professional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi yang sportif. Sumber daya manusia yang professional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusun laporan keuangan yang berkualitas.

Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahwuni, 2013:2). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir dan Triwahwuni, 2013:3). Menurut Darmawan (2014:16), secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut merupakan teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif.

Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi (Organization Commitment) adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi. Pengukurannya meliputi: affective commitment, continuence commitment, normatif comitment(Allen dan Meyer,1991 dikutip olehDunham, et al., 1994).Menurut Kalbers dan Forgati (1995) dikutip oleh Saerang dan Wokas (2011),komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi dan rasa kesetiaan kepada organisasi.

Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat.Dan dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan SAP.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk

membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer bertujuan untuk memperlancar arus informasi dan untuk memberikan kemudahan bagi para pengelola keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah

Definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi APBD (LRA)
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan
4. Laporan Arus Kas
5. Perubahan Saldo Anggaran Lebih
6. Laporan Operasional

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian ini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sektor publik masih relatif sedikit, karena bidang pemerintahan masih terbilang baru dalam dunia akuntansi indonesia, berbeda dengan sektor swasta, pada sektor swasta, kualitas laporan keuangan dapat dilihat hanya dari laporan keuangan yang bersifat kuantitatif yang biasanya tercermin dalam laba atau *earning*, pada sektor publik, komponen dalam laporan keuangan sektor publik memang lebih rumit dan kompleks, hal ini mengakibatkan perbedaan persepsi atas kualitas laporan keuangan.

Dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa penelitian terkait dengan kualitas informasi laporan keuangan sektor publik baik di dalam maupun diluar negeri. Mengingat

regulasi pemerintahan di Indonesia berbeda dengan negara lain, dan standar yang menjadi acuannya pun berbeda, memungkinkan didapat perbedaan hasil analisis yang cukup signifikan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah diringkas dalam tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Hongjiang Xu, Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin (2009)	Key Issues of Accounting Information Quality Management: Australian Case Study	Kualitas informasi akuntansi, sumber daya manusia, sistem, organisasi, faktor eksternal	Sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis yang menentukan kualitas informasi akuntansi
Fariziah Choirunisah (2008)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi	Kualitas informasi laporan keuangan SAI, kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem pengendalian	Sumber daya manusia dan organisasi tim Berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja
Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo (2008)	Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,	Kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Sedangkan

	informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Oganilir)	pengendalian intern akuntansi	pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan
Nugraheni dan Subaweh (2008)	Pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	Kualitas laporan keuangan, penerapan SAP	standar akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
(Winidyaningrum 2009)	Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi	Keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda, sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan dan ketepatanwaktuan.
(Sukmaningrum 2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah	Kualitas informasi laporan keuangan, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif.
Mahaputra dan putra (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan daerah	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem	Kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif

		pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah	terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.
Desianawati (2014)	Pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Kualitas informasi laporan keuangan pemda, kompetensi SDM, SAP, SAKD	Kompetensi sumber daya manusia , penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala.

1. Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini memberikan bukti terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara persial kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perubahan perundang-undangan maupun peraturanperaturan yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah ternyata mampu diantisipasi oleh pemerintah daerah terutama di pemerintah daerah Kota Bitung. Kemampuan ini terjadi karena sumber daya manusia telah siap untuk mendukung pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan memahami perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual, yang secara langsung akan berkaitan dengan teknis operasional penatausahaan keuangan daerah maupun teknis akuntansinya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Kualitas SDM tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

H1 : Kualitas SDM berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini memberikan bukti terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, untuk meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya. Sistem pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan /ketidak akuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang di peroleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Pengendalian Internal tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

H2 : Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini memberikan bukti terdapat pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dinas-dinas di kabupaten Kota Bitung dituntut untuk meningkatkan pengawasan keuangan di lingkungan kerjanya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Pengawasan Keuangan Tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

H3 : Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

4. Kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. dalam Nogi bahwa asset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau human resource). Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et all salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control)

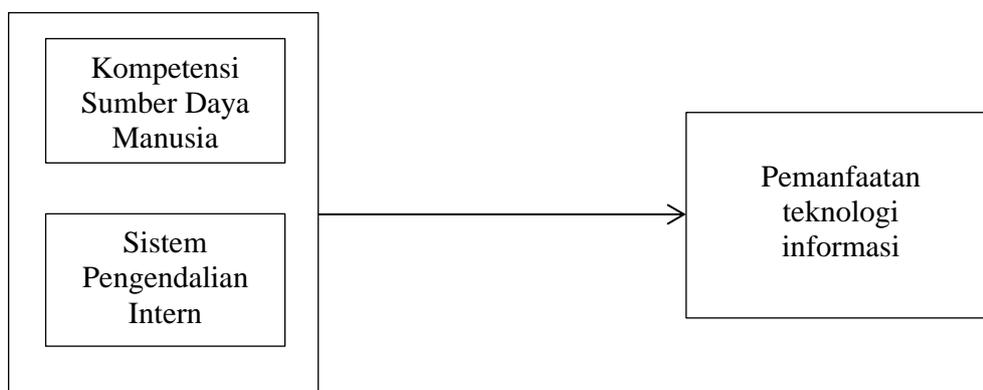
Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bitung

H4 : Kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bitung.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal. Kerangka pemikiran untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli dan data yang digunakan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Penelitian dengan data primer menggunakan teknik survei yaitu suatu perancangan penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul. Survey juga bertujuan untuk melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan ataupun nilai tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti. Data primer dalam penelitian ini

diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo.

Tempat Penelitian

Dinas BKAD Jl. Sam Ratulangi No. 45, Kec. Maesa. Kel. Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi ini strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti.

Definisi Variabel

Tabel 2. Definisi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Dependen (Terikat)			
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan”	Menurut Soermaso (2004:2) 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Interval
Variabel Independen (Bebas)			
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	Mangkunegara (2012:40) Kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.	Menurut Sutrisno (2009:204) 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Perilaku	Interval
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	Mulyadi (2014:21) menyatakan “Teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar.	Menurut Suyanto (2005:11) 1. Perangkat keras 2. Perangkat lunak Komputer 3. Jaringan dan komunikasi 4. Database 5. Personalia teknologi informasi	Interval
Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa SPI ialah proses yang integral pada tindakan dan	Menurut PP No. 60 Tahun 2008: 1. Lingkungan pengendalian	Interval

	kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penilaian resiko 3. Pengendalian informasi dan komunikasi 4. Pemantauan dan pengendalian intern. 	
Komitmen Organisasi (X ₄)	Khhaarul Umam (2010:259) mendefinisikan bahwa “Komitmen Organisasi memiliki arti penerimaan yang kuat dalam diri individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, sehingga individu tersebut akan berkarya serta memiliki keinginan yang kuat untk bertahan di organisasi.”	Menurut Allen dan Meyer (2011) <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Affektive Commitment</i> 2. <i>Continuance commitment</i> 3. <i>Normative commitment</i> 	Interval

Sumber: dari berbagai jurnal, 2021

Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Narasumber dalam penelitian ini, diambil dari Dinas BKAD Kota Bitung.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode *Interview* atau Wawancara

Interview atau Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Pada penelitian ini peneliti melakukan *interview* atau wawancara kepada Bendahara Keuangan Dinas BKAD Kota Bitung yang merupakan objek penelitian ini.

2. Metode Observasi

Menurut Patton observasi adalah sebuah metode yang akurat dan spesifik dalam melakukan pengumpulan data serta memiliki tujuan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang sedang berlangsung untuk dijadikan objek kajian dalam sebuah penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara dan penyebaran kuesioner.

Salah satu ciri penelitian kuantitatif adalah bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Instrument selain manusia (seperti: angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas penelitian sebagai instrument kunci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam melakukan penelitian.

Metode Analisis

1. Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Data merupakan bahan baku informasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan Topik dalam penelitiannya.

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah adalah tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Biasanya, proses reduksi data umum dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Biasanya pada penelitian ini akan ditemukan beragam data di lapangan, sehingga harus dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain lain.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah rangkuman atau penarikan akhir dari suatu informasi atau data, sedangkan verifikasi adalah proses memastikan kebenaran atau keabsahan suatu informasi atau pernyataan. Jadi, kesimpulan seringkali merupakan hasil akhir dari analisis atau evaluasi terhadap data atau informasi, sedangkan verifikasi melibatkan pengecekan dan konfirmasi terhadap kebenaran atau keabsahan suatu pernyataan. Dalam konteks penelitian atau analisis, kesimpulan seringkali dibuat setelah melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Kantor Dinas BKAD Kota Bitung.

Sampel responden dari penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Sekaran, 2009). *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan kriteria tersebut dilakukan karena pihak tersebut mampu untuk menggambarkan kualitas laporan keuangan dari tiap-tiap unit, dan dapat mempresentasikan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bitung secara keseluruhan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada Kantor Dinas bkad Kota Bitung
2. Lama menjabat pekerjaan adalah minimal 2 tahun, karena telah mempunyai pemahaman terhadap standar akuntansi berbasis akrual dengan baik.

Penentuan kriteria responden didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian keuangan atau akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis Sumber Data

1. Narasumber (Informan)

Menurut Bagong Suyatna narasumber adalah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang diteliti dan mempunyai keahlian dalam persoalan yang akan diteliti. Pada penelitian ini peran narasumber sangat penting karena bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Oleh karena itu, ia disebut sebagai informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, R. D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Efendi, L., & Abdullah, S. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(September), 182–195.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(3), 403–428.
- Harlinda. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau). *Jurnal Sorot*, 11(2).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik (Edisi 4)*. Yogyakarta: Andi.
- Setyowati, L., et al. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2).
- Setiawati, E., & Sari, S. P. (2014). Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi. *Syariah Paper*, 427–444.
- Sati, E. S. (n.d.). Faktor-faktor yang memengaruhi keandalan pelaporan keuangan daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang) [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Triyanto, H. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan daerah [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wijayanti, R. (2017). Pengaruh kompetensi SDM dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21–36.